

LAPORAN KINERJA

**Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Tahun 2024**



**Jalan H. Djok Mentaya No.23
Banjarmasin 70112**

KATA PENGANTAR



*P*uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dapat menyelesaikan **Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024** ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama tahun anggaran 2024, dengan berlandaskan prinsip good governance yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan legitimate, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas utama yang memastikan setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja ini tidak hanya mencerminkan upaya KPP Madya Banjarmasin dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai alat kendali dan evaluasi kinerja, baik secara internal maupun eksternal.

Pada tahun 2024, salah satu tantangan strategis yang dihadapi adalah kontraksi pertumbuhan bruto dari sektor pertambangan, yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas global serta dinamika kebijakan perdagangan internasional. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak dari sektor tersebut. Dalam menghadapi kondisi ini, KPP Madya Banjarmasin berkomitmen untuk mengoptimalkan penggalan potensi pajak, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai bentuk respons terhadap dinamika ekonomi nasional dan global.

Secara eksternal, LAKIN ini berfungsi sebagai alat komunikasi capaian kinerja yang bersifat kuantitatif dan kualitatif kepada pemangku kepentingan, sekaligus wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Banjarmasin dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Sedangkan secara

internal, laporan ini menjadi alat evaluasi dan motivasi untuk terus memacu peningkatan kinerja organisasi.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, atas dukungan, kerja sama, dan kontribusi yang telah diberikan sepanjang tahun 2024. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi pijakan bagi perbaikan berkelanjutan, guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas laporan di masa mendatang.

Banjarmasin, 31 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Irwan Martis

NIP 19690316 198903 1 001



DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik dan Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Wewenang dan Tanggungjawab	3
E. Sistematika Pelaporan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi	9
1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024	9
2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya	11
3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024	12
4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional	12
5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU	13
6. Rencana aksi ke depan	17
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	22

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama KPP Madya Banjarmasin Tahun 2024.....	7
Tabel 3.1 Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU KPP Madya Banjarmasin Tahun 2024.....	8
Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024.....	10
Tabel 3.3 Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024.....	11
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi lima tahun sebelumnya	11
Tabel 3.5 : Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Renja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024.....	12
Tabel 3.6 : Realisasi Anggaran Belanja KPP Madya Banjarmasin Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2024.....	21

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR



Gambar 1.1 Bagan Organisasi KPP Madya Banjarmasin.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan nasional. Prinsip ini menuntut penerapan sistem pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan, dan terukur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam konteks tersebut, penyusunan Laporan Kinerja menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang telah dilakukan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak. Namun, pada tahun 2024, KPP menghadapi tantangan besar berupa kontraksi pertumbuhan bruto dari sektor pertambangan. Penurunan ini disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas global serta perubahan kebijakan perdagangan internasional, yang berdampak langsung pada realisasi penerimaan pajak.

Dengan latar belakang ini, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh atas capaian KPP Madya Banjarmasin selama tahun 2024, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan langkah strategis yang telah diambil. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengendalian internal, tetapi juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas , Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

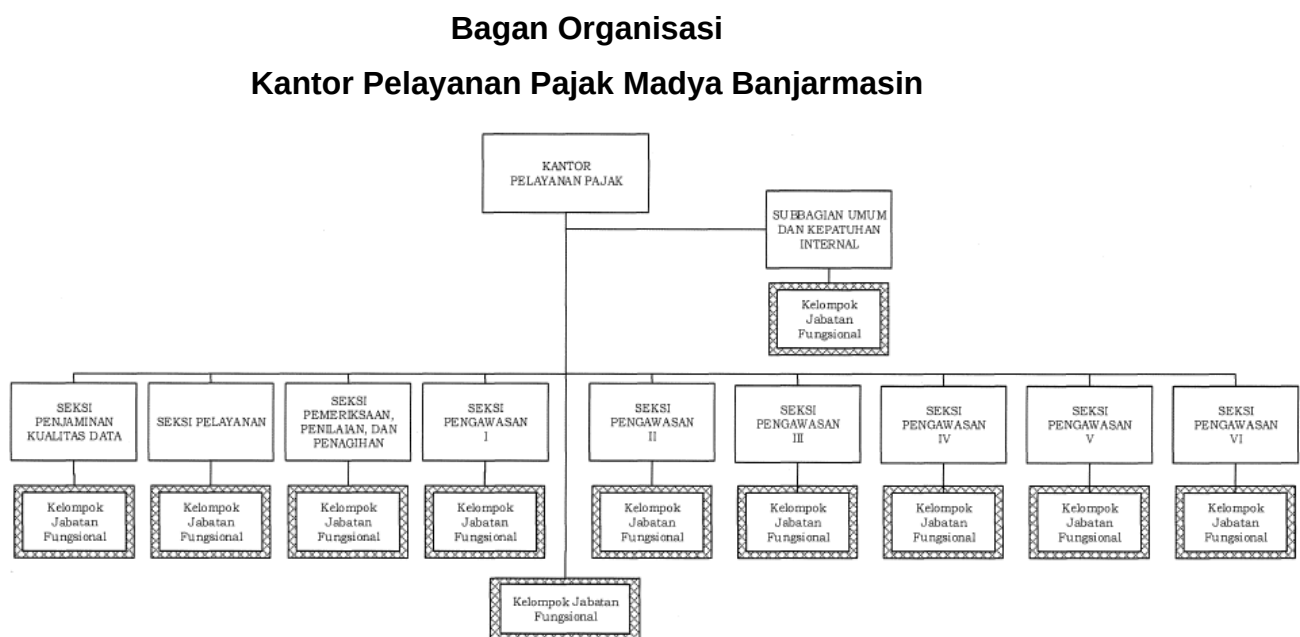
Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan
- p. nonperpajakan; dan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (lihat bagan organisasi) adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 : Bagan Organisasi KPP Madya Banjarmasin

Pada tahun pajak 2024 ini Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah untuk mengumpulkan target penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp12.058.645.640,00

Dalam pelaksanaan tugas, KPP Madya Banjarmasin didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta profesional. Pada tahun 2024 jumlah pegawai di KPP Madya Banjarmasin tercatat sejumlah 113 pegawai, yang terdiri dari 83 laki-laki dan 30 perempuan. KPP Madya Banjarmasin berkomitmen terhadap GEDSI yang tercermin dalam upaya pemberdayaan SDM yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas, tapi juga menciptakan suasana kerja yang kondusif serta adil bagi para pegawai.

C. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin selama tahun 2024, Capaian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai perbaikan kinerja di masa datang.

Oleh karena itu penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin tahun 2024 disusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II: Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Madya Banjarmasin pada tahun 2024.

D. Kinerja Lain-lain

Menguraikan achievement seperti penghargaan, keterlibatan organisasi dan lainnya.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan atas hasil rekomendasi di tahun sebelumnya.

Bab IV: Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Rencana strategis merupakan suatu proses untuk mewujudkan Laporan Kinerja (LAKIN) yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun (1-5 tahun).

Rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin tidak terlepas dari visi, dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah.

Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

“ Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan ”

Misi

Misi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategi organisasi di dalam berbagai bidang dalam lingkungannya dimana Ditjen Pajak beraktifitas dan berinteraksi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional dan bermotivasi.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab kinerja dengan atasan yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja dalam periode satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
(1)	(2)		(3)
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
	01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
	02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%

Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
	04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
	06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
	07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
	07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
Data dan informasi yang berkualitas	08a-N	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	87%
	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
Penguatan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel 2.1 : Target Indikator Kinerja Utama KPP Madya Banjarmasin Tahun 2024

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan KPP Madya Banjarmasin yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya dengan mengirimkan Nota Dinas Kepala KPP Madya Banjarmasin Nomor ND- 1214/KPP.2911/2024 tanggal 22 Agustus 2024 hal Penyampaian Masukkan Refinement Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal DJP Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut analisa atas Indikator Kinerja Utama Realisasi Penerimaan Pajak :

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

Tabel 3.1 : Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU KPP Madya Banjarmasin Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	27,00%	55,00%	55,00%	81,00%	81,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	16,66%	46,32%	46,32%	67,08%	67,08%	100,04%	100,04%
Capaian	61,70%	84,22%	84,22%	82,81%	82,81%	100,04%	100,04%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Banjarmasin Tahun 2024 dari Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

• Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak	x 100%
Target Penerimaan Pajak	

- **Realisasi IKU**

Tabel 3.2 : Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

No.	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPH NON MIGAS	6.956,65	8.721,62	6.764,47	10%	-22%	99%	97%
B	PPN dan PPnBM	5.096,16	3.987,81	5.293,07	59%	33%	110%	104%
C	PBB dan BPHTB	-	(0,03)	(0,04)	99%	-60%	0%	0%
D	Pajak Lainnya	5,83	9,13	6,18	25%	-32%	102%	106%
E	PPH MIGAS	-	(0,02)	-	-219%	100%	0%	0%
F	Pendapatan PPh DTP	-	1,61	(0,02)	-75%	-101%	0%	0%
Total Non PPh Migas		12.058,65	12.720,15	12.063,66	22,09%	-5,16%	102,08%	100,04%
Total termasuk PPh Migas		12.058,65	12.720,13	12.063,66	22,09%	-5,16%	102,08%	100,04%

Sumber : <https://appportal.intranet.pajak.go.id/> diakses pada tgl 23 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp12.063.658.905.129 dengan capaian sebesar 100,04% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp12.058.645.640.000. Realisasi pada periode ini turun sebesar 5,16% dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 22,09%

Tabel 3.3 : Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

No.	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	% Pert. 2022-2023	% Pert. 2023-2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh NON MIGAS	6.956,65	8.721,62	6.764,47	10,4%	-22,4%	98,8%	97,2%
	1. PPh Pasal 21	601,13	516,15	582,40	21,9%	12,8%	95,8%	96,9%
	2. PPh Pasal 22	892,39	863,18	892,39	-10,3%	3,4%	95,3%	100,0%
	3. PPh Pasal 22 Impor	105,85	40,40	105,85	-17,9%	162,0%	100,2%	100,0%
	4. PPh Pasal 23	901,71	892,83	901,71	21,6%	1,0%	93,7%	100,0%
	5. PPh Pasal 25/29 OP	53,58	39,16	56,08	8,8%	43,2%	98,0%	104,7%
	6. PPh Pasal 25/29 Badan	3.659,31	5.575,55	3.483,36	21,3%	-37,5%	100,8%	95,2%
	7. PPh Pasal 26	19,76	64,38	19,76	-49,2%	-69,3%	99,9%	100,0%
	8. PPh Final	721,25	728,28	721,25	-24,8%	-1,0%	96,7%	100,0%
	9. PPh Non Migas Lainnya	1,69	1,69	1,69	-14,4%	-0,3%	101,8%	100,0%
B	PPN dan PPnBM	5.096,16	3.987,81	5.293,07	58,8%	32,7%	110,1%	103,9%
	1. PPN Dalam Negeri	4.616,87	3.739,44	4.813,77	62,0%	28,7%	110,8%	104,3%
	2. PPN Impor	479,18	246,37	479,18	24,0%	94,5%	100,1%	100,0%
	3. PPnBM Dalam Negeri	0,11	(0,07)	0,11	-109,7%	249,9%	-3,6%	100,0%
	4. PPnBM Impor	-	0,22	-	76903,0%	-100,0%	147218,0%	0,0%
	5. PPN Lainnya	0,01	0,02	0,01	-10,2%	-48,3%	171,1%	100,0%
	6. PPnBM Lainnya	-	0,00	0,00	0,0%	-33,3%	0,0%	0,0%
	7. PPN DN DTP	-	1,84	-	-51,1%	-100,0%	0,0%	0,0%
C	PBB dan BPHTB	-	(0,03)	(0,04)	99,5%	-59,7%	0,0%	0,0%
D	Pajak Lainnya	5,83	9,13	6,18	24,9%	-32,3%	101,8%	106,1%
E	PPh MIGAS	-	(0,02)	-	-218,9%	100,0%	0,0%	0,0%
F	Pendapatan PPh DTP	-	1,61	(0,02)	-74,6%	-101,4%	0,0%	0,0%
Total Non PPh Migas		12.058,65	12.720,15	12.063,66	22,09%	-5,16%	102,08%	100,04%
Total trmsk PPh Migas		12.058,65	12.720,13	12.063,66	22,09%	-5,16%	102,08%	100,04%

Sumber : <https://appportal.intranet.pajak.go.id/> diakses pada tgl 23 Januari 2025

Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp3.483,36 triliun, PPh Pasal 23 dengan realisasi sebesar Rp901,71 triliun, dan PPh Pasal 22 sebesar Rp892,39 triliun.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3.4 : Perbandingan realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	114,59%	118,00%	102,08%	100,04%

Sumber : Arsip Hasil Validasi NKO Tahun 2021-2023 dan Aplikasi Mandor

KPP Madya Banjarmasin mulai beroperasi pada 24 Mei 2021 sehingga tidak terdapat realisasi pada tahun 2020. Sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Banjarmasin pada tahun 2024 mencapai 100,04%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 karena sebagian besar dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di sektor tambang yang menjadi mayoritas penerimaan pada KPP Madya Banjarmasin.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tabel 3.5 : Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Renja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,04%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Penerimaan Pajak menggambarkan tren baik pemulihan aktivitas ekonomi pada wilayah kerja KPP Madya Banjarmasin. Berikut beberapa hal yang melatarbelakangi kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 antara lain :

- Mempercepat penyelesaian pemeriksaan khusus dengan berpedoman pada Kertas Kerja Analisis dari Account Representative (AR).
- Melaksanakan edukasi perpajakan melalui platform daring, seperti Zoom Meeting, Microsoft Teams, podcast, dan live Instagram.
- Melaksanakan wawancara dan/atau kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak

Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tuisi DJP antara lain :

- Rasio Perpajakan terhadap PDB
- Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,04%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus dengan memperhatikan Kertas Kerja Analisis dari AR;
2. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan rutin atas SP2 Lebih Bayar berdasarkan data dan bukti yang sudah diperoleh;
3. Melakukan pengawalan pembayaran atas komitmen dari Wajib Pajak;
4. Mempercepat penerbitan Surat Teguran;
5. Melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak dan melakukan pemindahbukuan atas rekening Wajib Pajak yang telah di blokir;
6. Melaksanakan lelang aset Wajib Pajak;
7. Melakukan pengawasan pembayaran piutang pajak terhadap Wajib Pajak yang telah menyerahkan komitmen;
8. Melayani konseling Wajib Pajak melalui Whatsapp;
9. Melakukan pengiriman WhatsApp Blast dalam rangka reminder pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT dan pembayaran;
10. Melakukan edukasi perpajakan melalui media zoom meeting/microsoft teams, podcast dan live Instagram;
11. Melakukan kegiatan edukasi perpajakan tema II diutamakan WP memiliki risiko kepatuhan rendah dan sedang yang masuk dalam posisi X1Y1, X1Y2, X1Y3, X2Y1, X2Y2 dan X3Y1;
12. Melakukan kegiatan edukasi perpajakan tema III diutamakan WP memiliki risiko kepatuhan tinggi yang masuk dalam posisi X3Y3, X2Y3, dan/atau X3Y2;
13. Membentuk Tim Penyuluh KPP Madya Banjarmasin yang anggotanya tidak hanya dari fungsional penyuluh namun melibatkan pegawai di KPP Madya Banjarmasin yang memiliki kemampuan dalam kegiatan edukasi kepada Wajib Pajak ;
14. Mengajukan usulan sarana dan prasana terkait kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara daring;

15. Menggunakan data atau keterangan yang mendukung pelaksanaan edukasi perpajakan kepada wajib pajak;
 16. Melakukan edukasi perpajakan one on one untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan;
 17. Mengadakan saluran pelayanan dan konsultasi secara online yang responsif dan berkualitas agar meningkatkan kepuasan Wajib Pajak terhadap layanan yang diberikan;
 18. Melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak calon responden survei kepuasan layanan agar mendapatkan data calon responden yang valid;
 19. Melakukan unggahan terkait informasi peraturan perpajakan pada media social;
 20. Melakukan percepatan penyelesaian layanan unggulan Wajib Pajak;
 21. Melakukan Wawancara dan/atau Kunjungan ke Tempat Wajib Pajak, Berkoordinasi dengan AR Sebelumnya untuk lebih mengenal berbagai hal terkait Wajib Pajak;
 22. Melakukan manajemen restitusi dan melakukan pengawasan komprehensif terhadap Wajib Pajak; dan
 23. Membuat Pakta Integritas Para Pihak sebagai salah satu alat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 1. Penurunan capaian atas IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terjadi karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global serta dinamika kebijakan perdagangan. Solusi yang dilakukan oleh KPP Madya Banjarmasin seperti terus menjalin koordinasi serta komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak, meningkatkan kompetensi SDM pegawai, serta mengoptimalkan penggalan potensi dari sektor lainnya.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi sumber daya telah dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai KPP Madya Banjarmasin yang menerapkan sistem informasi *Office Kemenkeu* sebagai bentuk minimalis penggunaan kertas, rutin mematikan komputer setelah jam kerja, dan menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan kunjungan kerja ke tempat Wajib Pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Melakukan pemeriksaan secara cermat sesuai data prioritas Wajib Pajak yang akan jatuh tempo serta dilakukan konseling Wajib Pajak secara konsisten;
2. Menghadiri IHT atau one on one meeting secara rutin terkait proses penangihan aktif bersama dengan Kanwil dan kantor pusat;
3. Melakukan konseling Wajib Pajak dengan meminta bantuan Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil;
4. Mengedukasi perpajakan melalui media zoom meeting/microsoft teams, podcast dan live Instagram;;
5. Melaksanakan penyuluhan aktif dengan melaksanakan visit kepada Wajib Pajak di tempat kedudukan/usahanya; dan
6. Mengirimkan WhatsApp Blast secara rutin dan cermat kepada Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai data dari sistem yang akurat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan Mitigasi Risiko sejalan dengan keberhasilan pencapaian target kinerja unit organisasi, dengan kata lain apabila risiko unit organisasi berhasil dimitigasi maka upaya pencapaian atas target kinerja dapat terlaksana dengan maksimal, sebagaimana tercermin pada nilai realisasi rencana aksi mitigasi risiko yaitu sebesar 100% yang berhasil membuat KPP Madya Banjarmasin mencapai target kinerja yang ditentukan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 111.11%

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi organisasi. Beberapa hambatan utama dan langkah yang diambil untuk mengatasinya antara lain:

- a. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang memengaruhi stabilitas penerimaan. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan optimalisasi dalam perencanaan

penerimaan, pelaporan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara berkala, serta tindak lanjut atas laporan tersebut guna memastikan efektivitas pelaksanaan strategi.

- b. Perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak. Kendala ini diatasi melalui pengawasan yang terfokus sesuai dengan kebijakan nasional, serta peningkatan sinergi dalam bentuk program bersama, analisis terpadu, dan proses bisnis kolaboratif untuk memperkuat efektivitas penggalan potensi pajak.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki peran penting dalam mendukung Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti pembangunan aksesibilitas di ruang publik, serta memberikan insentif kepada sektor-sektor yang mempekerjakan individu dengan kebutuhan khusus.
 - c. Pajak dapat dialokasikan kembali melalui program-program belanja sosial yang dirancang untuk mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN, pajak memiliki peran penting dalam mendukung berbagai isu strategis melalui langkah-langkah berikut:

- a. Pajak dapat dimanfaatkan untuk mendanai infrastruktur ramah lingkungan, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak berkontribusi sebagai sumber anggaran untuk program kesehatan dan nutrisi, termasuk upaya perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan.
- c. Pajak menjadi sumber pendanaan proyek pemerintah yang bertujuan memberdayakan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.
- d. Pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, mendukung program pemberdayaan masyarakat, serta menyalurkan subsidi dan bantuan langsung tunai bagi kelompok yang membutuhkan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Seksi	Rencana Aksi	Periode
Pengawasan 1 s.d 6	1. Melakukan himbauan melalui media sosial (IG, Twitter, FB dan WA Blast) sebagai upaya mendorong pembayaran ; 2. Membuat Daftar Nominatif WP yang belum melakukan pembayaran masa; 3. Membuat Konsep SP2DK berdasarkan Daftar Nominatif WP yang belum melakukan pembayaran masa; 4. Menerbitkan STP atas ketidakpatuhan pelaporan dan/atau pembayaran masa; 5. Melakukan himbauan dan pengawasan atas pemanfaatan insentif perpajakan; 6. Melakukan penelitian dan tindaklanjut hasil penyandingan data (Data Matching); 7. Melakukan teguran kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan perpanjangan SPT Tahunan dan belum melaporkan SPT Tahunan; 8. Melakukan kunjungan kerja bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan untuk asistensi pengisian SPT serta membuat usul WP NE jika WP tidak ditemukan;	2025

	9. Menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang telah ditegur dan dihimbau tetapi belum juga lapor SPT Tahunan; 10. Melakukan pengawasan Komprehensif Wajib Pajak Strategis dengan menerbitkan SP2DK dan LHP2DK untuk menguji kepatuhan WP; 11. Melakukan kolaborasi penggalan potensi dengan PPNS Kanwil; 12. Mengusulkan pemeriksaan terhadap para Wajib Pajak yang tidak respon atas SP2DK; 13. Melakukan penggalan potensi sektor tertentu yang ditargetkan meningkat di tahun 2022 seperti Batubara, Perkebunan Kelapa Sawit, Transportasi serta Sarana Pendukung Kegiatan Pertambangan dan Perkebunan, Farmasi dan Alkes, dan Perdagangan Besar; 14. Melakukan pengawasan atas Transaksi yang terindikasi Transfer Pricing antara lain dengan mengadakan Sharing Knowledge Transfer Pricing, membuat permintaan dokumen penentuan harga transfer (TP Doc), dan melakukan analisis data laporan keuangan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan Transfer Pricing; 15. Melakukan pengawasan berbasis segmentasi Wajib Pajak: WP OP HWI dan WP Group; dan 16. Melakukan Sinergi Pengawasan Program Bersama (Joint Program) instansi terkait.	
Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	1. Prioritas penyelesaian berkas pemeriksaan atas Surat Perintah Pemeriksaan Lebih Bayar yang jatuh tempo pada tahun 2022; 2. Prioritas penyelesaian berkas pemeriksaan atas Surat Perintah Pemeriksaan Khusus; 3. Memantau komitmen pembayaran Wajib Pajak atas SKP sampai dengan akhir tahun; 4. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang	2025

	telah memiliki komitmen pembayaran/angsuran; 5. Inventarisasi Wajib Pajak yang diprioritaskan untuk diusulkan pencegahan; 6. Melakukan profiling Wajib Pajak untuk menentukan strategi tindakan penagihan; 7. Menerbitkan dokumen berupa Surat Teguran dan Surat Paksa secara berkala, serta mengirimkan/menyampaikan kepada Wajib Pajak; dan 8. Mengirimkan undangan konseling serta melaksanakan konseling terhadap Wajib Pajak dengan prioritas Wajib Pajak 100 besar.	
Pelayanan	1. Membuat platform kehumasan dengan campaign-campaign yang mudah dimengerti dan dipahami yang disesuaikan oleh setiap lini target customers (Wajib Pajak atau masyarakat; 2. Melakukan program pendampingan pelaporan SPT dengan mendampingi Wajib Pajak dalam proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh (baik di KPP Madya Banjarmasin maupun di lokasi Wajib Pajak); 3. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan sebanyak 30 (tiga puluh) kegiatan yang terdiri minimal 15 kegiatan tema II dan minimal 15 kegiatan tema III; 4. Melaksakan kegiatan edukasi perpajakan metode penyuluhan tidak langsung satu arah dengan jenis kegiatan sinier dilaksanakan minimal 1 kali per semester; 5. Melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan metode penyuluhan tidak langsung dua arah dengan jenis kegiatan penyuluhan melalui media sosial (instagram live) dilaksanakan minimal 1 kali per triwulan; 6. Memberikan layanan konsultasi melalui Whatsapp (FIA,FICO,dan FICI : Flash Information Administration, Consultation, & Current Issue); dan 7. Melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-	2025

	undangan seperti pemberian surat teguran penyampaian SPT.	
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	1. Melakukan pemutakhiran data pegawai di SIKKA dan HRIS; 2. Melaksanakan Analisis Beban Kerja (ABK) KPP Madya Banjarmasin; 3. Membuat pemetaan kebutuhan pegawai sebagai tindak lanjut ABK; 4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai; 5. Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko; 6. Melakukan optimalisasi atas capaian IKU Pelaksanaan Anggaran; 7. Mengajukan usul revisi anggaran untuk belanja modal; 8. Membentuk Tim Internalisasi Kepatuhan; 9. Menyusun Rencana dan Jadwal Internalisasi Kepatuhan sesuai Rencana Pemantauan Tahunan; dan 10. Melaksanakan Kegiatan Internalisasi Kepatuhan.	2025
Penjaminan Kualitas Data	1. Mencari, menganalisa data, memutakhirkan data dan melakukan pengiriman serta penyajian hasil analisa data per periode; 2. Melakukan pemeliharaan server dan jaringan; 3. Melakukan monitoring Kesehatan Perangkat Per Periode; 4. Melakukan penyusunan Monografi Fiskal; dan 5. Membuat usulan upgrade perangkat.	2025

B. Realisasi Anggaran

Sehubungan realisasi anggaran yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin pada tahun 2024 dari jumlah Anggaran Setelah Revisi sebesar Rp7.480.089.000.000 dan jumlah Realisasi Belanja Netto sebesar Rp7.290.972.066 yang menghasilkan capaian Realisasi Anggaran sebesar 97,47% dengan sisa anggaran sebesar Rp189.116.934

Adapun rincian realisasi anggaran per sub kelompok adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024								
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 ESELON I : 04 WILAYAH/PROVINSI : 240 SATUAN KERJA : 119161 JENIS SATUAN KERJA : KD			KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN PAJAK KALIMANTAN SELATAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANJARMASIN			Kode Lap : LRA.B.S.2 Tanggal : 24/01/25 3:06 PM Halaman : 1 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM		
								
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	984,020,000	835,725,000	829,657,000	0	829,657,000	99.27	6,068,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	984,020,000	835,725,000	829,657,000	0	829,657,000	99.27	6,068,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	23,927,000	130,891,000	96,354,000	0	96,354,000	73.61	34,537,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	23,927,000	130,891,000	96,354,000	0	96,354,000	73.61	34,537,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,007,947,000	966,616,000	926,011,000	0	926,011,000	95.8	40,605,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,392,085,000	1,364,507,000	1,353,200,289	0	1,353,200,289	99.17	11,306,711
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	463,401,000	251,789,000	249,801,654	0	249,801,654	99.21	1,987,346
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	77,136,000	77,136,000	77,136,000	0	77,136,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	218,892,000	460,486,000	459,700,728	0	459,700,728	99.83	785,272
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,151,514,000	2,153,918,000	2,139,838,671	0	2,139,838,671	99.35	14,079,329
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	393,290,000	413,290,000	383,487,876	0	383,487,876	92.79	29,802,124
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	335,282,000	479,082,000	425,118,643	0	425,118,643	88.74	53,963,357
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	728,572,000	892,372,000	808,606,519	0	808,606,519	90.61	83,765,481
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	371,721,000	294,617,000	293,463,131	0	293,463,131	99.61	1,153,869
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	371,721,000	294,617,000	293,463,131	0	293,463,131	99.61	1,153,869
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	324,000,000	318,000,000	298,747,821	0	298,747,821	93.95	19,252,179
522112	Belanja Langganan Telepon	113,002,000	113,002,000	111,520,679	0	111,520,679	98.69	1,481,321
522113	Belanja Langganan Air	16,800,000	16,800,000	14,251,030	0	14,251,030	84.83	2,548,970
522141	Belanja Sewa	152,000,000	60,104,000	55,022,920	0	55,022,920	91.55	5,081,080
522151	Belanja Jasa Profesi	0	6,200,000	6,153,846	0	6,153,846	99.26	46,154
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	605,802,000	514,106,000	485,696,296	0	485,696,296	94.47	28,409,704
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	347,140,000	347,140,000	347,095,209	0	347,095,209	99.99	44,791
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154,957,000	220,475,000	219,417,918	0	219,417,918	99.52	1,057,082
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18,000,000	5,500,000	3,945,000	0	3,945,000	71.73	1,555,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 240
SATUAN KERJA : 119161
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PAJAK
KALIMANTAN SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANJARMASIN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/01/25 3:06 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/1/25 8:54 AM



KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	520,097,000	573,115,000	570,458,127	0	570,458,127	99.54	2,656,873
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,927,938,000	2,085,345,000	2,066,898,322	0	2,066,898,322	99.12	18,446,678
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,927,938,000	2,085,345,000	2,066,898,322	0	2,066,898,322	99.12	18,446,678
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,305,644,000	6,513,473,000	6,364,961,066	0	6,364,961,066	97.72	148,511,934
	JUMLAH BELANJA	7,313,591,000	7,480,089,000	7,290,972,066	0	7,290,972,066	97.47	189,116,934

Tabel 3.6 : Realisasi Anggaran Belanja KPP Madya Banjarmasin Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2024

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024, dan disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

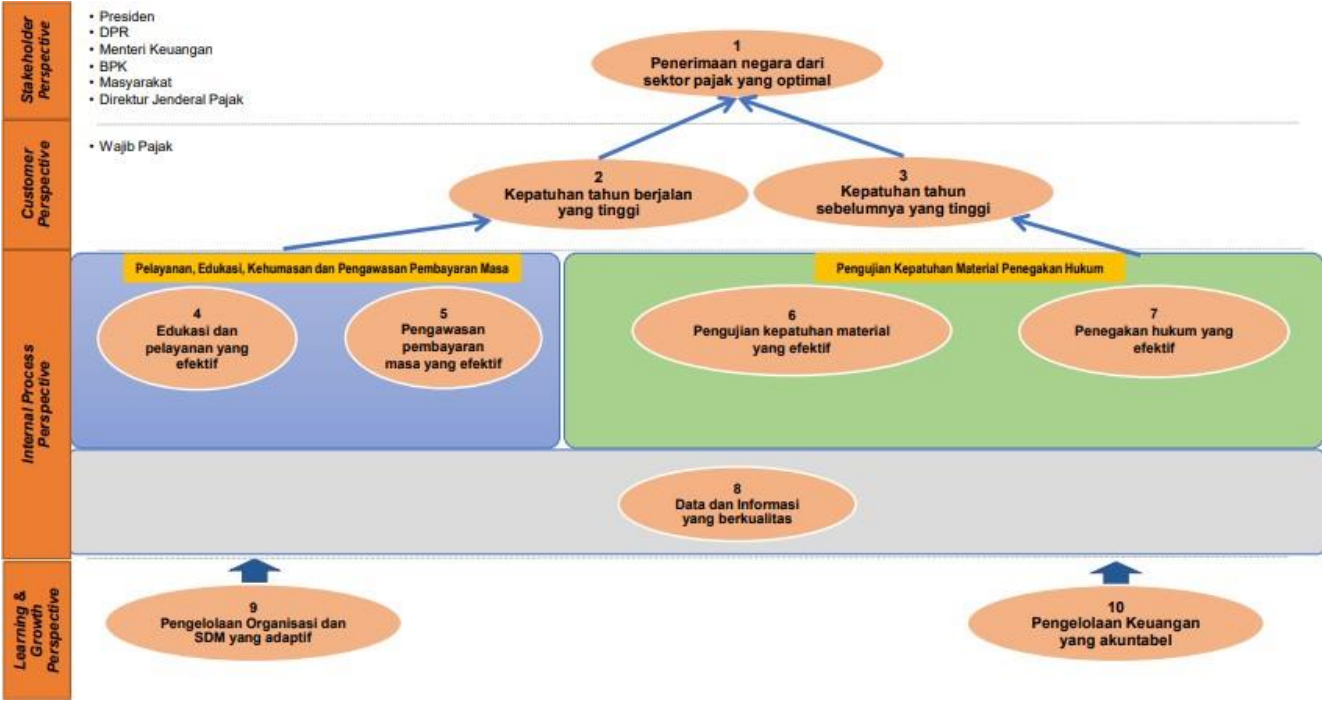
Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahunan berikutnya.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-7/WPJ.29/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
BANJARMASIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANJARMASIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara		Rp 2.321.049.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		Rp 454.417.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum		Rp 1.866.632.000
B.Program Dukungan Manajemen		Rp 4.992.542.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum		Rp 3.984.595.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM		Rp 1.007.947.000
Total		Rp 7.313.591.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan
Selatan dan Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar

Banjarmasin, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin,



Ditandatangani Secara Elektronik
Irwan Martis



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANJARMASIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	27%	55%	55%	81%	81%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	27%	55%	55%	81%	81%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Banjarmasin, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya
Banjarmasin,



Ditandatangani Secara Elektronik
Irwan Martis



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANJARMASIN
KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	UIC	Anggaran (rupiah)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara tepat sasaran	Peningkatan persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Q1: Melakukan pendataan Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan penyuluhan	Q1: Penyuluhan yang diberikan tepat sasaran	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	364.417.000
				Q2: Melakukan pendataan Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan penyuluhan	Q2: Penyuluhan yang diberikan tepat sasaran			
				Q3: Melakukan pendataan Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan penyuluhan	Q3: Penyuluhan yang diberikan tepat sasaran			
				Q4: Melakukan pendataan Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan penyuluhan	Q4: Penyuluhan yang diberikan tepat sasaran			
		Meningkatkan kegiatan penyuluhan <i>One On One</i> bagi Wajib Pajak terkait SPT Tahunan, SPT masa, Pemenuhan Kewajiban Perpajakan untuk Pengusaha Kena Pajak, dan Pembayaran Pajak	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan <i>One on One</i>	Q1: Melakukan kegiatan penyuluhan One on One kepada Wajib Pajak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Wajib Pajak	Q1: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan yang efektif karena sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Wajib Pajak			
				Q2: Melakukan kegiatan penyuluhan One on One kepada Wajib Pajak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Wajib Pajak	Q2: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan yang efektif karena sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Wajib Pajak			
				Q3: Melakukan kegiatan penyuluhan One on One kepada Wajib Pajak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Wajib Pajak	Q3: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan yang efektif karena sesuai dengan			



				permasalahan yang dialami oleh Wajib Pajak			
			Q4:Melakukan kegiatan penyuluhan One on One kepada Wajib Pajak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Wajib Pajak	Q4: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan yang efektif karena sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Wajib Pajak			
		Membuka Kelas Pajak 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis	Pelaksanaan kegiatan Kelas Pajak	Q1: Membuka Kelas Pajak 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis	Q1: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya		
				Q2: Membuka Kelas Pajak 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis	Q2: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya		
				Q3: Membuka Kelas Pajak 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis	Q3: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya		
				Q4: Membuka Kelas Pajak 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis	Q4:Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya		
		Meningkatkan kegiatan kehumasan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan	Publikasi pada media sosial	Q1: Melakukan peningkatan kegiatan kehumasan terkait publikasi pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelaporan maupun pembayaran	Q1: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya		
				Q2: Melakukan peningkatan kegiatan kehumasan terkait publikasi pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelaporan maupun pembayaran	Q2: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya		
				Q3:Melakukan peningkatan kegiatan kehumasan terkait publikasi pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelaporan maupun pembayaran	Q3:Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya		



				Q4:Melakukan peningkatan kegiatan kehumasan terkait publikasi pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelaporan maupun pembayaran	Q4:Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya			
		Melakukan sinergi dengan Account Representative masing-masing Wajib Pajak perihal pemenuhan kewajiban perpajakan	Pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak termonitoring dengan baik	Q1: Melakukan sinergi dengan Account Representative masing-masing Wajib Pajak perihal pemenuhan kewajiban perpajakan	Q1:Pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak termonitoring secara maksimal			
				Q2: Melakukan sinergi dengan Account Representative masing-masing Wajib Pajak perihal pemenuhan kewajiban perpajakan	Q2:Pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak termonitoring secara maksimal			
				Q3: Melakukan sinergi dengan Account Representative masing-masing Wajib Pajak perihal pemenuhan kewajiban perpajakan	Q3:Pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak termonitoring secara maksimal			
				Q4: Melakukan sinergi dengan Account Representative masing-masing Wajib Pajak perihal pemenuhan kewajiban perpajakan	Q4:Pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak termonitoring secara maksimal			
		Mengadakan sosialisasi dengan tema khusus	Kegiatan penyuluhan dengan tema khusus	Q1: Mengadakan sosialisasi dengan tema yang menyesuaikan perkembangan peraturan perpajakan	Q1: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan terbaru			
				Q2: Mengadakan sosialisasi dengan tema yang menyesuaikan perkembangan peraturan perpajakan	Q2: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan terbaru			
				Q3:Mengadakan sosialisasi dengan tema yang menyesuaikan perkembangan peraturan perpajakan	Q3: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan terbaru			
				Q4: Mengadakan sosialisasi dengan tema yang menyesuaikan perkembangan peraturan perpajakan	Q4: Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan terbaru			
		Memastikan bahwa Wajib Pajak yang telah	Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan	Q1: Melakukan monitoring pada Wajib Pajak yang telah dilakukan penyuluhan dan memastikan bahwa	Q1: Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan			



		dilakukan penyuluhan sudah melakukan kewajiban perpajakannya baik berupa pelaporan maupun pembayaran	penyuluhan yang termonitor dengan baik	Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Q2: Melakukan monitoring pada Wajib Pajak yang telah dilakukan penyuluhan dan memastikan bahwa Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Q3: Melakukan monitoring pada Wajib Pajak yang telah dilakukan penyuluhan dan memastikan bahwa Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Q4: Melakukan monitoring pada Wajib Pajak yang telah dilakukan penyuluhan dan memastikan bahwa Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan	penyuluhan yang termonitor dengan baik Q2: Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang termonitor dengan baik Q3: Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang termonitor dengan baik Q4: Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang termonitor dengan baik			
2	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara tepat sasaran Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak	Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan	Q1: Melakukan pendataan Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan penyuluhan Q2: Melakukan pendataan Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan penyuluhan Q3: Melakukan pendataan Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan penyuluhan Q4: Melakukan pendataan Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan penyuluhan Q1: Melakukan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam segala aspek Q2: Melakukan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam segala aspek	Q1: Penyuluhan yang diberikan tepat sasaran Q2: Penyuluhan yang diberikan tepat sasaran Q3: Penyuluhan yang diberikan tepat sasaran Q4: Penyuluhan yang diberikan tepat sasaran Q1: Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan Q2: Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	90.000.000



				Q3: Melakukan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam segala aspek	Q3:Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan			
				Q4:Melakukan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam segala aspek	Q4:Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan			
				Q1: Mengirimkan pesan berisi apresiasi kepada Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan	Q1: Wajib Pajak yang merasa diapresiasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan			
				Q2: Mengirimkan pesan berisi apresiasi kepada Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan	Q2: Wajib Pajak yang merasa diapresiasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan			
		Meningkatkan kegiatan kehumasan berupa pengiriman pesan berisi apresiasi kepada Wajib Pajak	Pesan apresiasi kepada Wajib Pajak	Q3: Mengirimkan pesan berisi apresiasi kepada Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan	Q3:Wajib Pajak yang merasa diapresiasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan			
				Q4: Mengirimkan pesan berisi apresiasi kepada Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan	Q4:Wajib Pajak yang merasa diapresiasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan			
				Q1: Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan	Q1: Daftar Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan			
				Q2: Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan	Q2: Daftar Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan			
		Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan	Daftar Wajib Pajak yang permohonan dan/atau pelaporan	Q3: Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan	Q3: Daftar Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan			
				Q4: Mengirimkan pesan berisi permohonan mengisi survei kepada Wajib Pajak terkait	Q4: Hasil survei			
		Melakukan koordinasi dengan Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3 untuk	Daftar Wajib Pajak yang diberikan pelayanan oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3	Q1: Melakukan koordinasi dengan Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3 untuk menginventarisasi Wajib Pajak yang diberikan pelayanan oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3	Q1: Melakukan koordinasi dengan Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3 untuk menginventarisasi Wajib Pajak yang diberikan			



		menginventarisasi Wajib Pajak yang diberikan pelayanan oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3			pelayanan oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3			
				Q2: Melakukan koordinasi dengan Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3 untuk menginventarisasi Wajib Pajak yang diberikan pelayanan oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3	Q2: Melakukan koordinasi dengan Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3 untuk menginventarisasi Wajib Pajak yang diberikan pelayanan oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3			
				Q3: Melakukan koordinasi dengan Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3 untuk menginventarisasi Wajib Pajak yang diberikan pelayanan oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3	Q3: Melakukan koordinasi dengan Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3 untuk menginventarisasi Wajib Pajak yang diberikan pelayanan oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3			
				Q4: Permohonan daftar Wajib Pajak yang telah diinventarisasi oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3	Q4: Daftar Wajib Pajak yang telah diinventarisasi oleh Seksi pengawasan I s.d. VI dan P3			
		Memastikan Wajib Pajak telah mengisi survei yang diberikan	Survei terlaksana dengan efektif dan/atau efesien	Q1:	Q1:			
				Q2:	Q2:			
				Q3:	Q3:			
				Q4: Memastikan Wajib Pajak telah mengisi survei	Q4:Survei terlaksana dengan efektif dan/atau efesien			
3	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	Menerbitkan STP yang seharusnya diterbitkan	Peningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak	Q1: Membuat LAPHIT atas STP	Q1 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan 1-6	1.715.103.000
				Q2: Membuat LAPHIT atas STP	Q2 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q3: Membuat LAPHIT atas STP	Q3 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran			



					Pajak			
				Q4: Membuat LAPHIT atas STP	Q4 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
		Melakukan Pengawasan dinamisasi angsuran PPh 25		Q1: Membuat Laporan Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25	Q1 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q2: Membuat Laporan Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25	Q2 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q3: Membuat Laporan Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25	Q3 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q4: Membuat Laporan Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25	Q4 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
		Melakukan pengawasan data pembayaran Wajib Pajak		Q1: Melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) dan analisa mandiri	Q1 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q2: Melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) dan analisa mandiri	Q2 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q3: Melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) dan analisa mandiri	Q3 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran			



					Pajak				
				Q4: Melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) dan analisa mandiri	Q4 : Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak				
4	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	Melakukan penerbitan SP2DK	Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak	Q1: Melakukan Penerbitan SP2DK	Q1: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan 1-6	1.715.103.000	
				Q2: Melakukan Penerbitan SP2DK	Q2: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
				Q3: Melakukan Penerbitan SP2DK	Q3: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
				Q4: Melakukan Penerbitan SP2DK	Q4: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
		Melakukan konseling kepada Wajib Pajak		Q1: Melakukan konseling kepada Wajib Pajak dan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan	Q1: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
				Q2: Melakukan konseling kepada Wajib Pajak dan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan	Q2: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
				Q3: Melakukan konseling kepada Wajib Pajak dan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan	Q3: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
				Q4: Melakukan konseling kepada Wajib Pajak dan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan	Q4: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
		Melakukan kunjungan kerja (visit)		Q1: Melakukan kunjungan kerja (visit) Wajib Pajak dan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan	Q1: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
				Q2: Melakukan kunjungan kerja (visit) Wajib Pajak dan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan	Q2: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
				Q4: Melakukan kunjungan kerja (visit) Wajib Pajak dan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan	Q3: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				
				Q4: Melakukan kunjungan kerja (visit) Wajib Pajak dan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan	Q4: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak				



		Melakukan penerbitan LHP2DK		Q1: Melakukan penerbitan LHP2DK dengan memberikan keterangan yang jelas	Q1: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			
				Q2: Melakukan penerbitan LHP2DK dengan memberikan keterangan yang jelas	Q2: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			
				Q3: Melakukan penerbitan LHP2DK dengan memberikan keterangan yang jelas	Q3: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			
				Q4: Melakukan penerbitan LHP2DK dengan memberikan keterangan yang jelas	Q4: Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			
5	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Mengusulkan IDLP dari kegiatan himbauan, konseling maupun pemeriksaan	Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak	Q1: Melakukan pengecekan pada aplikasi konfirmasi PK-PM untuk mendeteksi Wajib Pajak penerbit TBTS	Q1: Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan 1-6	1.715.103.000
				Q2: Melakukan pengecekan pada aplikasi konfirmasi PK-PM untuk mendeteksi Wajib Pajak penerbit TBTS	Q2: Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak			
				Q3: Melakukan pengecekan pada aplikasi konfirmasi PK-PM untuk mendeteksi Wajib Pajak penerbit TBTS	Q3: Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak			
				Q4: Melakukan pengecekan pada aplikasi konfirmasi PK-PM untuk mendeteksi Wajib Pajak penerbit TBTS	Q4: Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak			
		Melakukan pengembangan IDLP secara proaktif dengan cara menciptakan kasus mandiri	Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak	Q1: Melakukan penelitian terhadap data diluar Approweb dan Apportal untuk mendeteksi pelanggaran pidana yang dilakukan WP	Q1: Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak			
				Q2: Melakukan penelitian terhadap data diluar Approweb dan Apportal untuk mendeteksi pelanggaran pidana yang dilakukan WP	Q2: Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak			
				Q3: Melakukan penelitian terhadap data diluar Approweb dan Apportal untuk mendeteksi pelanggaran pidana yang dilakukan WP	Q3: Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak			



				Q4: Melakukan penelitian terhadap data diluar Approweb dan Apportal untuk mendeteksi pelanggaran pidana yang dilakukan WP	Q4: Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak			
6	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi Komite Kepatuhan	Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak	Q1 : Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak	Q1 : Terjadi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan 1-6	1.715.103.000
				Q2 : Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak	Q2 : Terjadi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak			
				Q3 : Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak	Q3 : Terjadi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak			
				Q4 : Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak	Q4 : Terjadi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak			
7	Tingkat Efektivitas Penagihan	Melakukan identifikasi Ketetapan, Profiling dan Konseling Wajib Pajak/Penangung Pajak, Intensifikasi Kegiatan Penagihan Aktif	Mengetahui ketetapan yang belum dan segera daluwarsa, Wajib pajak berkomitmen melunasi utang pajak, Wajib Pajak melunasi utang pajak	Q1: Mengawasi ketetapan yang akan daluwarsa, Mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak, Melaksanakan tindakan Penagihan berupa Surat teguran sampai dengan blokir	Q1: Mengetahui ketetapan yang belum dan segera daluwarsa, Wajib pajak berkomitmen melunasi utang pajak, Wajib Pajak melunasi utang pajak	Januari-Desember 2024	Seksi P3	76.272.000
				Q2: Mengawasi ketetapan yang akan daluwarsa, Mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak, Melaksanakan tindakan Penagihan berupa Surat teguran sampai dengan blokir	Q2: Mengetahui ketetapan yang belum dan segera daluwarsa, Wajib pajak berkomitmen melunasi utang pajak, Wajib Pajak melunasi utang pajak			
				Q3: Mengawasi ketetapan yang akan daluwarsa, Mengirim Surat Undangan Konseling kepada Wajib Pajak, Mengintensifkan tindakan penagihan aktif sehingga target tindakan penagihan aktif dapat tercapai pada Q3	Q3: Mengetahui ketetapan yang belum dan segera daluwarsa, Wajib pajak berkomitmen melunasi utang pajak, Wajib Pajak melunasi utang pajak, Target tindakan penagihan dapat tercapai			
				Q4: Mengawasi ketetapan yang akan daluwarsa, Melaksanakan konseling dan melakukan pengawasan atas konseling sebelumnya, Melaksanakan	Q4: Mengetahui ketetapan yang belum dan segera daluwarsa, Wajib pajak berkomitmen melunasi utang			



				tindakan penagihan dengan berfokus pada pencairan	pajak, Wajib Pajak melunasi utang pajak			
8	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Meningkatkan intensitas pembahasan materi terkait pemeriksaan yang sedang dilakukan di Tim Pemeriksa	Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu	Q1: Melaksanakan pembahasan materi terkait pemeriksaan secara intensif di Tim Pemeriksa	Q1: Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu	Januari-Desember 2024	Seksi P3	18.684.000
				Q2: Melaksanakan pembahasan materi terkait pemeriksaan secara intensif di Tim Pemeriksa	Q2: Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu			
				Q3: Melaksanakan pembahasan materi terkait pemeriksaan secara intensif di Tim Pemeriksa	Q3: Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu			
				Q4: Melaksanakan pembahasan materi terkait pemeriksaan secara intensif di Tim Pemeriksa	Q4: Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu			
		Mempercepat penyelesaian permintaan informasi terkait rekening koran/data perbankan	Pemeriksaan berjalan secara efektif	Q1: Mempercepat proses permintaan terkait Rekening Koran/Data Perbankan	Q1: Kegiatan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif			
				Q2: Mempercepat proses permintaan terkait Rekening Koran/Data Perbankan	Q2: Kegiatan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif			
				Q3: Mempercepat proses permintaan terkait Rekening Koran/Data Perbankan	Q3: Kegiatan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif			
				Q4: Mempercepat proses permintaan terkait Rekening Koran/Data Perbankan	Q4: Kegiatan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif			
		Meningkatkan intensitas kerjasama dengan Pejabat Fungsional Penilai.	Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu	Q1: Melakukan kerjasama untuk menilai property, tingkat suku bunga wajar, dan nilai wajar perusahaan.	Q1: Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu			
				Q2: Melakukan kerjasama untuk menilai property, tingkat suku bunga wajar, dan nilai wajar perusahaan.	Q2: Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu			
				Q3: Melakukan kerjasama untuk menilai property, tingkat suku bunga wajar, dan nilai wajar perusahaan.	Q3: Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu			
				Q4: Melakukan kerjasama untuk menilai property, tingkat suku bunga wajar, dan nilai wajar perusahaan.	Q4: Pemeriksaan diselesaikan secara tepat waktu			



9	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Memastikan setiap usulan telah dilakukan pembahasan oleh Komite Kepatuhan	Usulan pemeriksaan disampaikan dengan optimal	Q1: Melaksanakan pembahasan usulan pemeriksaan dan menindaklanjuti usulan pemeriksaan	Q1: Usulan Pemeriksaan dikirimkan ke Kantor Wilayah	Januari-Desember 2024	Seksi P3, Seksi Pengawasan 1-6	
				Q2: Melaksanakan pembahasan usulan pemeriksaan dan menindaklanjuti usulan pemeriksaan	Q2: Usulan Pemeriksaan dikirimkan ke Kantor Wilayah			
				Q3: Melaksanakan pembahasan usulan pemeriksaan dan menindaklanjuti usulan pemeriksaan	Q3: Usulan Pemeriksaan dikirimkan ke Kantor Wilayah			
				Q4: Melaksanakan pembahasan usulan pemeriksaan dan menindaklanjuti usulan pemeriksaan	Q4: Usulan Pemeriksaan dikirimkan ke Kantor Wilayah			
10	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi Alat Keterangan	Melakukan inventarisir data Wajib Pajak yang diperlukan untuk kepentingan perpajakan	Data Wajib Pajak hasil pengamatan	Q1 : Melaksanakan kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi, Penagihan, dan Penilaian dalam rangka menemukan data Wajib Pajak	Q1 : Laporan Kegiatan Pengamatan	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan 1-6	56.573.000
				Q2 : Melaksanakan kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi, Penagihan, dan Penilaian dalam rangka menemukan data Wajib Pajak	Q2 : Laporan Kegiatan Pengamatan			
				Q3 : Melaksanakan kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi, Penagihan, dan Penilaian dalam rangka menemukan data Wajib Pajak	Q3 : Laporan Kegiatan Pengamatan			
				Q4 : Melaksanakan kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi, Penagihan, dan Penilaian dalam rangka menemukan data Wajib Pajak	Q4 : Laporan Kegiatan Pengamatan			
11	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Memberi penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan	Jam Pelatihan Pegawai terpenuhi dan pegawai memiliki kompetensi yang unggul	Q1: Memberikan waktu kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan	Q1: Jam pelatihan pegawai terpenuhi dan pegawai memiliki kompetensi yang unggul	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	3.569.134.000
				Q2: Memberikan waktu kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan	Q2: Jam pelatihan pegawai terpenuhi dan pegawai memiliki kompetensi yang unggul			
				Q3: Memberikan waktu kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan	Q3: Jam pelatihan pegawai terpenuhi dan pegawai memiliki kompetensi yang unggul			



				Q4: Memberikan waktu kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan	Q4: Jam pelatihan pegawai terpenuhi dan pegawai memiliki kompetensi yang unggul			
12	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	Merencanakan pelaksanaan Rapat DKO sebelum tanggal 7 setiap awal triwulan dan melakukan pemantauan Rencana Aksi Mitigasi Risiko dengan UIC masing-masing	Proporsi nilai pelaksanaan DKO yang maksimal dan rencana aksi berjalan atas risiko yang berkemungkinan muncul terhadap Sasaran Organisasi dapat ditangani	Q1: Pelaksanaan DKO sebelum tanggal 7 Juli dan Pemantauan rencana aksi terhadap UIC secara formal dengan pengiriman Nota Dinas setiap awal triwulan	Q1: Proporsi nilai pelaksanaan DKO dan persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan maksimal	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	415.461.000
				Q2: Pelaksanaan DKO sebelum tanggal 7 Juli dan Pemantauan rencana aksi terhadap UIC secara formal dengan pengiriman Nota Dinas setiap awal triwulan	Q2: Proporsi nilai pelaksanaan DKO dan persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan maksimal			
				Q3: Pelaksanaan DKO sebelum tanggal 7 Juli dan Pemantauan rencana aksi terhadap UIC secara formal dengan pengiriman Nota Dinas setiap awal triwulan	Q3: Proporsi nilai pelaksanaan DKO dan persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan maksimal			
				Q4: Pelaksanaan DKO sebelum tanggal 7 Oktober dan Pemantauan rencana aksi terhadap UIC secara formal dengan pengiriman Nota Dinas setiap awal triwulan	Q4: Proporsi nilai pelaksanaan DKO dan persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan maksimal			
13	Indeks Penilaian Integritas Unit	Melakukan pemutaran video anti korupsi	Pemutaran video anti korupsi	Q1: Pemutaran video anti korupsi oleh Direktur Jenderal Pajak dilaksanakan setiap sebelum memulai acara/kegiatan dan diputar secara terus menerus dibagian front office	Q1: Nilai-nilai anti korupsi selalu diingat oleh pegawai dan Stakeholder	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	1.007.947.000
				Q2: Pemutaran video anti korupsi oleh Direktur Jenderal Pajak dilaksanakan setiap sebelum memulai acara/kegiatan dan diputar secara terus menerus dibagian front office	Q2: Nilai-nilai anti korupsi selalu diingat oleh pegawai dan Stakeholder			
				Q3: Pemutaran video anti korupsi oleh Direktur Jenderal Pajak dilaksanakan setiap sebelum memulai acara/kegiatan dan diputar secara terus menerus dibagian front office	Q3: Nilai-nilai anti korupsi selalu diingat oleh pegawai dan Stakeholder			



				Q4: Pemutaran video anti korupsi oleh Direktur Jenderal Pajak dilaksanakan setiap sebelum memulai acara/kegiatan dan diputar secara terus menerus dibagian front office	Q4: Nilai-nilai anti korupsi selalu diingat oleh pegawai dan Stakeholder		Seksi Pengawasan 1-6	
		Membuat Pakta Integritas disetiap SP2DK yang disampaikan kepada Wajib Pajak	Meningkatkan integritas petugas pajak	Q1: Menyertakan Pakta Integritas setiap SP2DK	Q1: Meningkatkan integritas petugas pajak			
				Q2: Menyertakan Pakta Integritas setiap SP2DK	Q2: Meningkatkan integritas petugas pajak			
				Q3: Menyertakan Pakta Integritas setiap SP2DK	Q3: Meningkatkan integritas petugas pajak			
				Q4: Menyertakan Pakta Integritas setiap SP2DK	Q4: Meningkatkan integritas petugas pajak			
		Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak	Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan	Q1: Melakukan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam segala aspek	Q1: Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan			
				Q2: Melakukan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam segala aspek	Q2: Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan			
				Q3: Melakukan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam segala aspek	Q3:Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan			
				Q4:Melakukan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam segala aspek	Q4:Peningkatan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan			
		Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan	Daftar Wajib Pajak yang permohonan dan/atau pelaporan	Q1: Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan	Q1: Daftar Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan			
				Q2: Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan	Q2: Daftar Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan			
				Q3: Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan	Q3: Daftar Wajib Pajak yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan			
				Q4: Mengirimkan daftar inventarisasi Wajib Pajak kepada Kantor Wilayah untuk kemudian dilakukan survei	Q4: Daftar inventarisasi Wajib Pajak			
14	Indeks kinerja kualitas	Membuat perencanaan		Q1:Penyediaan kebutuhan belanja barang/modal	Q1: Tersedianya barang/modal	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan	313.591.000



	pelaksanaan anggaran	kebutuhan belanja barang/modal	Pengelolaan anggaran yang optimal	Q2:Penyediaan kebutuhan belanja barang/modal	Q2: Tersedianya barang/modal		Kepatuhan Internal	
				Q3:Penyediaan kebutuhan belanja barang/modal	Q3: Tersedianya barang/modal			
				Q4:Penyediaan kebutuhan belanja barang/modal	Q4: Tersedianya barang/modal			
				Q1:Peningkatan efisiensi pemanfaat anggaran	Q1: : Pelaksanaan anggaran yang berkualitas			
		Meningkatkan efisiensi pemanfaat anggaran	Pengelolaan anggaran yang optimal	Q2:Peningkatan efisiensi pemanfaat anggaran	Q2: : Pelaksanaan anggaran yang berkualitas			
				Q3:Peningkatan efisiensi pemanfaat anggaran	Q3: : Pelaksanaan anggaran yang berkualitas			
				Q4:Peningkatan efisiensi pemanfaat anggaran	Q4: : Pelaksanaan anggaran yang berkualitas			

Banjarmasin, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin,



Ditandatangani Secara Elektronik
Irwan Martis



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Irwan Martis		NAMA	Syamsinar
NIP	19690316 198903 1 001		NIP	19700414 199503 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.1/IVb		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis

7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	



PERILAKU KERJA		
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Banjarmasin,31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Irwan Martis

19690316 198903 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar

19700414 199503 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	115 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	27%	55%	55%	81%	81%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	27%	55%	55%	81%	81%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



	7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
	8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
	10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
	14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
	16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
	17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85



18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Banjarmasin, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Irwan Martis
19690316 198903 1 001



Ditandatangani secara elektronik
Syamsinar
19700414 199503 2 001

